

Bulan :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

2	0	2	4
---	---	---	---



SUBBAGIAN HUMAS

Tanggal :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	

Media Online	Detik.com
Media Cetak	

Laporan Keuangan 2023 Pemprov DKI Jakarta Raih Opini WTP dari BPK RI

Brigitta Belia Permata Sari

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta menggelar rapat paripurna penyerahan laporan hasil pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2023. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) memberikan predikat wajar tanpa pengecualian (WTP) terhadap laporan keuangan Pemprov DKI Jakarta. Rapat dilaksanakan di Ruang Rapat Paripurna DPRD DKI Jakarta, Kamis (25/7/2024). Rapat dihadiri langsung oleh Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono dan Wakil Ketua DPRD DKI Khoirudin.

Anggota V BPK RI Ahmad Noor Supit mengatakan, meskipun DKI Jakarta menerima predikat WTP, BPK menyatakan masih ada sejumlah temuan terkait laporan keuangan Pemprov. Dalam LHP DKI Jakarta 2023, misalnya, BPK menyampaikan masih menemukan permasalahan terkait pengelolaan keuangan daerah.

"Pertama, aset tetap tanah di lokasi surat izin penunjukan penggunaan tanah berpotensi tercatat ganda. Pencatatan bidang tanah adalah lokasi SIPPT belum seluruhnya didukung, dari pengembangan dan penyelesaian aset tetap konstruksi dalam pengerjaan berlarut-larut," kata Supit dalam rapat.

Kedua, dia mengatakan Pemerintah Provinsi DKI belum menerima pendapatan dari sewa lahan PT Jakarta Propertindo (JakPro), Bank DKI, dan pihak ketiga lainnya, serta potensi pendapatan atas pemanfaatan barang milik daerah yang belum didukung perjanjian kerja sama.

"Lalu kekurangan plome atas pelaksanaan beberapa paket pekerjaan dan keterlambatan penyelesaian pekerjaan belum dikenakan denda," ujarnya.

Sementara itu, Pemerintah Provinsi DKI belum memiliki mekanisme pencatatan atas penerimaan hibah langsung dari pemerintah pusat. Pihaknya juga menyoroti soal penyaluran bantuan sosial kepada penerima belum memenuhi kriteria pada Dinsos dan Disdik DKI Jakarta.

"Berdasarkan analisis dampak permasalahan yang ditemukan dalam proses pemeriksaan, dengan mempertimbangkan kesesuaian dan kewajaran laporan keuangan, sesuai standar akuntansi pemerintah, termasuk juga rencana aksi perbaikan yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, BPK memberikan opini wajar tanpa pengecualian," ucap Supit.

Atas laporan keuangan pemerintah tahun 2023, BPK mengatakan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah berhasil mempertahankan opini wajar tanpa pengecualian yang ke-7 kalinya.

"Capaian ini hendaknya menjadi dorongan untuk selalu meningkatkan akuntabilitas dan transparansi keuangan daerah serta meningkatkan laporan keuangan sehingga menjadi prestasi yang patut dibanggakan," ucapnya.

Sebagaimana diketahui, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) memberikan predikat wajar tanpa pengecualian (WTP) terhadap laporan keuangan Pemprov DKI Jakarta selama 6 tahun terakhir. Meskipun DKI Jakarta menerima predikat WTP, BPK menyatakan masih ada sejumlah temuan terkait laporan keuangan Pemprov DKI.

Dalam LHP DKI Jakarta 2022, misalnya, BPK menyampaikan ada temuan kelebihan pembayaran gaji bagi pegawai di Pemprov DKI Jakarta sebesar Rp 6,39 miliar. BPK juga menyoroti kekurangan volume pengadaan barang dan jasa Rp 4,06 miliar serta kelebihan pembayaran belanja hibah dan bansos senilai Rp 878 juta. Dari sisi pengelolaan aset, BPK menyoroti penatausahaan penyerahan dan pencatatan aset tetap fasos fasum belum tertib.

(bel/idn)